

## KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KAMPUNG SUMBER REZEKI DISTRIK KURIK KABUPATEN MERAUKE

**Welhelmina Jeujanan<sup>1)</sup>, Vinsenco R Serano<sup>2)</sup>, Paul Adryani Moento<sup>3)</sup>, Alexander Phuk Tjilen<sup>4)</sup>, Abdul Rizal<sup>5)</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus Merauke, Indonesia

<sup>5</sup> Fakultas Pertanian Universitas Musamus Merauke, Indonesia

Email: [welhelmina0@gmail.com](mailto:welhelmina0@gmail.com), [vincen@unmus.ac.id](mailto:vincen@unmus.ac.id), [paulmoento@unmus.ac.id](mailto:paulmoento@unmus.ac.id), [alexander@unmus.ac.id](mailto:alexander@unmus.ac.id), [abdulrizal@unmus.ac.id](mailto:abdulrizal@unmus.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Sumber Rezeki Distrik Kurik Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Subjek penelitian terdiri dari 7 orang yang dianggap terlibat langsung dalam setiap kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki, yaitu kepala Kampung, ketua BPD, ketua LPM, Ketua PKK, ketua Karang Taruna serta masing-masing 1 orang tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kampung Sumber Rezeki. Pengumpulan data dilakukan menggunakan pedoman wawancara dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Kemampuan manajerial Kepala Kampung Sumber Rezeki tercermin pada Musrenbang, pembentukan organisasi, kepemimpinan persuasif-edukatif, serta pengendalian pembangunan, berdampak optimal secara fisik, namun partisipasi perencanaan masyarakat masih rendah karena kehadiran warga minim, (b) Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki didukung oleh gaya kepemimpinan kepala kampung serta penerapan prinsip transparansi dan keterbukaan. Namun, pelaksanaannya juga menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi masyarakat akibat sebagian besar warga beraktivitas di luar kampung sehingga keterlibatan dalam perencanaan pembangunan belum optimal.

**Kata Kunci:** Pola Komunikasi; Keluarga; Single-Parent; Kohesivitas; Adaptabilitas.

### ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the managerial capacity of the Head of Sumber Rezeki Village in the implementation of development activities, as well as the supporting and inhibiting factors influencing the execution of development programs in Sumber Rezeki Village. The study was conducted in Sumber Rezeki Village, Kurik District, Merauke Regency, South Papua Province. The research subjects consisted of seven individuals who were considered to be directly involved in development activities in Sumber Rezeki Village, namely the Village Head, the Chairperson of the Village Consultative Body, the Chairperson of the Community Empowerment Institution, the Head of the Family Welfare Movement, the Chairperson of the Youth Organization, as well as one community leader and one customary leader. Data were collected using interview guidelines and subsequently analyzed using a qualitative descriptive approach. The results of the study indicate that: (a) the managerial capacity of the Head of Sumber Rezeki Village is reflected in the implementation of village development planning forums (Musrenbang), organizational formation, persuasive-educative leadership, and development control, which have resulted in optimal physical development outcomes; however, community participation in the planning process remains low due to limited resident attendance; and (b) the implementation of development activities in Sumber Rezeki Village is supported by the leadership style of the village head and the application of principles of transparency and openness. Nevertheless, the implementation also faces obstacles in the form of low community participation, as most residents engage in activities outside the village, resulting in suboptimal involvement in development planning.

**Keywords:** Communication Patterns; Family; Single-Parent; Cohesiveness; Adaptability.

## PENDAHULUAN

Pembangunan kampung merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sebagai entitas pemerintahan terendah, kepala kampung memiliki kewenangan dalam merancang dan melaksanakan pembangunan kampung. Namun, pembangunan kampung juga tidak terlepas dari program pembangunan tingkat kabupaten yang dikoordinasikan oleh bupati. Dalam pelaksanaannya, baik pada level perencanaan hingga implementasi, diperlukan tenaga profesional guna memastikan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Meski demikian, keterlibatan masyarakat tetap menjadi elemen kunci dalam proses pembangunan di tingkat kampung. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya menunjukkan bentuk pemberdayaan, tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai subjek sekaligus objek pembangunan (Suryono, 2021).

Kampung merupakan tempat tinggal mayoritas penduduk Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan nasional. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat kampung harus menjadi prioritas, yang dilakukan melalui penguatan prakarsa lokal dan swadaya masyarakat. Pengembangan kampung dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut serta melalui pemanfaatan dana bantuan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pembangunan berbasis masyarakat yang menekankan pentingnya partisipasi lokal dan kemandirian dalam proses pembangunan (Sutrisno, 2020).

Pembangunan kampung diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dalam berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan, dan ketahanan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan kampung harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh melalui pemberdayaan seluruh komponen masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk mendorong transformasi kampung dari tahap Swakarya menuju tahap Swasembada, sehingga setiap kampung dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan (Kementerian Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2021).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial yang dimiliki oleh kepala kampung dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Kepala kampung dituntut mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dengan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya, agar warga dapat menentukan sendiri prioritas pembangunan yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis wilayahnya. Lebih dari sekadar kemampuan teknis, keberhasilan kepala kampung dalam menumbuhkan partisipasi juga sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan dan model manajemen yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung (Sari & Nugroho, 2022). Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pembangunan oleh kepala kampung sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan pola manajemen yang diterapkannya. Artinya, kesuksesan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada konsep dan pendekatan individual kepala kampung dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pemerintahan serta dalam mengelola mekanisme kebijakan, baik yang berkaitan dengan aspek keuangan dan keuntungan maupun aspek sosial.

Fenomena dan dinamika kehidupan masyarakat di kampung saat ini menuntut adanya keterbukaan dan transparansi, serta komitmen kuat dari seorang kepala kampung untuk memberikan kontribusi signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika kepala kampung tidak mampu menjalankan tugasnya dengan sikap terbuka dan fleksibel, hal tersebut akan sangat memengaruhi pencapaian target maksimal dalam proses pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Struktur kegiatan yang terarah, terencana, dan terprogram secara mendetail hanya dapat terlaksana jika didukung oleh kemampuan kepala kampung yang bersifat terbuka dan transparan serta tidak berpihak pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Dengan demikian, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat mencapai tingkat optimal dan kesuksesan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kampung memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat kampung untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan dan pembangunan daerah secara

berkelanjutan dan terpadu, di bawah koordinasi serta fasilitasi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Dengan demikian, peran dan kedudukan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan menjadi semakin besar

Selain itu, prinsip keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan anggaran dan keuangan negara oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah harus dijalankan oleh para pemangku kebijakan (*stakeholders*) di daerah. Dengan demikian, amanat dan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kampung), dapat terlaksana secara efektif dan optimal

Hasil pengamatan di Kampung Sumber Rezeki menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan mulai mengadopsi prinsip-prinsip manajemen yang baik. Masyarakat telah memperoleh peran dan porsi yang cukup sebagai subjek dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Meskipun partisipasi aktif masyarakat pada tahap perencanaan masih tergolong rendah, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, antusiasme mereka sangat tinggi. Hal ini terlihat dari kehadiran masyarakat yang aktif membantu mempercepat dan mensukseskan penyelesaian kegiatan pembangunan tersebut.

Keberhasilan atau kegagalan kepala kampung dalam menyelenggarakan pembangunan di kampung terutama disebabkan oleh ketidakmampuan kepala kampung dalam mengoptimalkan pendekatan manajerial kepemimpinan pada setiap kebijakan yang dijalankan. Selain itu, kegagalan juga dapat terjadi apabila kepala kampung bersikap berpihak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, aspek manajerial dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepala kampung hanya akan bernilai baik jika dilaksanakan secara terbuka dan memperhatikan seluruh aspirasi serta kepentingan masyarakat kampung.

Kepala Kampung Sumber Rezeki menerapkan pendekatan manajerial yang cukup baik dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Hal ini tercermin dari tahapan kegiatan pembangunan yang mengikuti langkah-langkah manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Selain itu,

kepala kampung secara konsisten melakukan pendekatan kepemimpinan serta pengendalian dan pengawasan yang berkesinambungan selama proses pelaksanaan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama lima bulan, dengan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah melakukan survey, tahap kedua adalah pengambilan data lapangan, dan tahap ketiga adalah pengolahan data dan analisis data. Penelitian akan dilaksanakan di Kampung Sumber Rezeki Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kemampuan Manajerial Kepala Kampung Sumber Rezeki Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan**

Sebagaimana ditetapkan sebelumnya dalam definisi operasional penelitian mengenai kemampuan manajer kepala kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka dalam uraian hasil penelitian berikut dikemukakan komponen tentang aspek manajerial tersebut yaitu: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengarahan atau pengendalian. Keseluruhan aspek tersebut dibahas secara bertahap sebagai suatu bagian dari mekanisme pelaksanaan kegiatan secara manajerial dalam rangka mengoptimalkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam suatu kegiatan pembangunan sebagaimana topik penelitian ini.

#### **1. Perencanaan**

Tahapan kegiatan pembangunan yang baik harus dimulai dengan sebuah perencanaan yang matang dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar pada saat pelaksanaan kegiatan tidak ada lagi kendala atau hambatan yang ditemui karena pada saat pembuatan rencana kegiatan, seluruhnya telah dikaji dan di bahas secara menyeluruh. Perencanaan pembangunan dilakukan melalui kegiatan Musrenbang dimana proses kegiatannya dikendalikan oleh kepala kampung bersama ketua BPD Kampung Sumber Rezeki. Proses perencanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui Musrenbang mengikuti sertakan seluruh komponen yang akan

terlibat dalam kegiatan pembangunan, sehingga perencanaan yang dibuat bersifat komprehensif dan mengakomodir seluruh kepentingan yang akan terlibat dalam pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan.

Sebagaimana halnya perencanaan kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki, kepala kampung mengundang dan mengharapkan kehadiran seluruh lapisan masyarakat untuk hadir dalam perumusan dan perencanaan kegiatan pembangunan, sebagai bagian dari pendekatan manajerial yang dijalankan oleh kepala kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pendekatan manajerial dalam aspek perencanaan yang dilakukan oleh kepala Kampung Sumber Rezeki Distrik Kurik dilakukan dengan tujuan: penyerapan aspirasi masyarakat secara menyeluruh, mengakomodir seluruh aspirasi berupa masukan, saran dan usulan dari komponen masyarakat dan membuat rumusan rencana kegiatan pembangunan yang aspiratif.

Kepala kampung mendahulukan aspirasi masyarakat dalam setiap melakukan perencanaan dalam kegiatan pembangunan. Hal ini menggambarkan bahwa kepala Kampung Sumber Rezeki memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen pengelolaan sebuah kegiatan dengan melakukan musyawarah untuk membuat suatu permufakatan dan menerima masukan dan saran dari seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari sikap aspiratif dan keterbukaan seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Disisi lain, tanggapan masyarakat Kampung Sumber Rezeki terhadap sikap kepala kampung yang aspiratif dan terbuka terhadap setiap masukan dan saran yang diberikan dalam perencanaan pembangunan, dijelaskan oleh masyarakat dalam wawancara berikut:

“Kepala kampung bersikap terbuka dengan cara mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat baik berupa masukan maupun kritikan yang diajukan masyarakat dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Hal ini menandakan bahwa kepala kampung memiliki sikap yang baik sebagai pimpinan kepada masyarakatnya” (Ketua LPM Kampung Sumber Rezeki, wawancara September 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa sikap terbuka dan mengakomodir seluruh aspirasi berupa masukan saran dan usulan serta kritikan

dalam perencanaan kegiatan pembangunan menggambarkan kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki yang baik dalam pelaksanaan pembangunan karena telah mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pembangunan. Kemampuan kepala Kampung Sumber Rezeki yang telah dapat mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pembangunan, berimplikasi terhadap upaya pembuatan rumusan rencana kegiatan pembangunan yang aspiratif, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:

“Kepala kampung telah dapat membuat rumusan rencana kegiatan pembangunan yang aspiratif. Hal ini terlihat dari rencana kegiatan yang berasal dari masyarakat, karena rencana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kampung Sumber Rezeki dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti jalan usaha tani sebagai akses masyarakat dari rumah ke lokasi usaha (sawah dan kebun)” (Tokoh masyarakat Kampung Sumber Rezeki, wawancara September 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa kemampuan manajerial kepala dalam perencanaan kegiatan telah baik karena mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan pembangunan, sehingga rumusan rencana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Kampung Sumber Rezeki benar-benar aspiratif dan lahir dari masyarakat yang membutuhkan dan berkepentingan dengan kegiatan pembangunan tersebut.

Berdasarkan uraian wawancara tentang kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan pembangunan pada aspek perencanaan, menunjukkan bahwa kemampuan manajerial kepala kampung telah cukup baik karena bersifat aspiratif dan mampu mengakomodir sarana, masukan serta kritikan masyarakat untuk dijadikan acuan dalam perumusan rencana kegiatan pembangunan.

## 2. Pengorganisasian

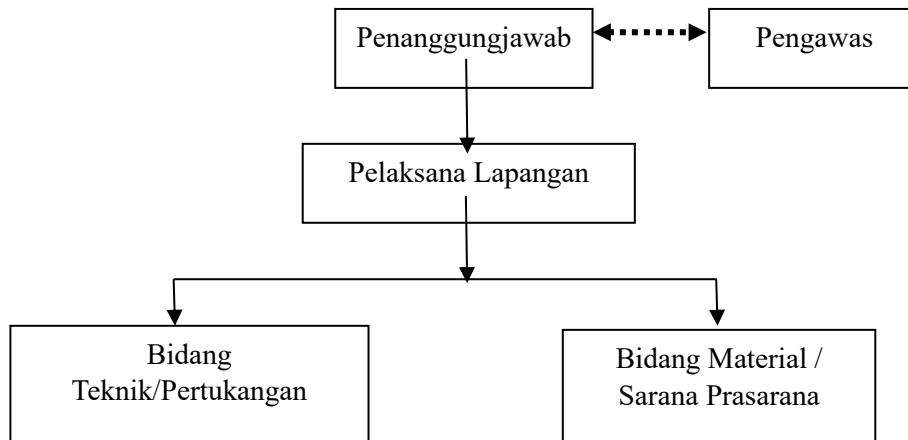
Aspek pengorganisasian pada kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan pembangunan, ditunjukkan dari penyusunan dan penetapan organisasi pelaksana kegiatan pembangunan beserta uraian tugas yang terperinci dari masing-masing individu dalam organisasi pelaksana pembangunan.

Kesuksesan sebuah pelaksanaan kegiatan pembangunan sangat ditentukan oleh eksistensi organisasi pelaksana kegiatan tersebut. Kepala Kampung Sumber Rezeki menyusun dan menetapkan organisasi pelaksana kegiatan pembangunan sebagai bagian dari upaya mensukseskan dan mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakannya sebuah kegiatan pembangunan. Sejalan dengan pernyataan di atas informan lainnya memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk mengoptimalkan capaian program pembangunan, maka perlu dibentuk organisasi pelaksananya, jadi ada organisasi yang khusus bertanggungjawab terhadap setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan, kepala kampung beserta seluruh perangkat dan organisasi mitra kerjanya bersama-sama menyusun dan menetapkan organisasi pelaksana pembangunan tersebut seperti misalnya jalan usah tani ada penanggungjawabnya” (Ketua Karang Taruna, wawancara, September 2025).

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran sebuah kegiatan pembangunan, maka dibentuklah organisasi pelaksana yang bertanggungjawab secara teknis dalam pengelolaan fisik dan keuangan sebuah kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki. Penyusunan dan penetapan organisasi pelaksana kegiatan pembangunan merupakan perwujudan kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki pada aspek pengorganisasian yaitu dengan cara memilih dan menetapkan personil organisasi pelaksana kegiatan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik dan kemampuan (keterampilan) yang dimiliki oleh individu dalam menangani dan melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Susunan organisasi pelaksana kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki sangat sederhana dan tidak merekrut terlalu banyak personil, biasanya terdiri dari pelaksana, penanggungjawab dan unsur pengawas. Komponen pelaksana terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan komponen pendukung seperti bidang teknik/pertukangan dan material/pengadaan sarana prasarana. Unsur penanggungjawab biasanya terdiri dari ketua LPM dan kepala kampung sedangkan komponen pengawasan berasal dari organisasi BPD. Secara singkat hirarkis organisasi pelaksana pembangunan di Kampung Sumber Rezeki:



Gambar. Skema Organisasi Pelaksana Pembangunan

Kemampuan manajerial kepala kampung juga dapat dilihat pada saat memilih dan menetapkan individu pelaksana kegiatan pembangunan yang benar-benar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya serta mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menjadi tugas dan tanggung-jawabnya.

Pendekatan manajerial kepala kampung untuk melakukan pemilihan dan penetapan personil pelaksana suatu kegiatan pembangunan berdasarkan pendekatan kemampuan dan keterampilan serta penguasaan terhadap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa aspek pengorganisasian pembangunan melalui pemilihan dan personil pelaksana pembangunan yang benar-benar memenuhi syarat yang dibutuhkan adalah suatu pendekatan manajerial yang dilakukan oleh kepala Kampung Sumber Rezeki dengan baik. Hal ini menandakan bahwa kepala Kampung Sumber Rezeki memiliki kemampuan manajerial dalam mengorganisasikan pelaksanaan pembangunan di kampungnya dengan baik dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

### 3. Kepemimpinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala Kampung Sumber Rezeki melakukan pendekatan kepemimpinan dalam pelaksanaan pembangunan di kampungnya dengan cara komunikasi dan menciptakan hubungan baik

(*transformasional*) dan memberikan penggantian upah kerja yang layak sesuai dengan kesepakatan (*transaksional*) terhadap para tenaga kerja terampil yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Aspek kepemimpinan dalam penilaian tentang kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan pembangunan merupakan komponen yang paling penting, karena kepemimpinan (*leadership*) adalah seni untuk mempengaruhi dan menstimulasi kinerja. Bila aspek ini dapat diterapkan secara tepat, maka kepemimpinan dapat membuat orang biasa dapat melakukan hal yang luar biasa. Kepemimpinan muncul dari kekuasaan, tetapi kekuasaan dapat berjalan mulai dari paksaan sampai dengan kharisma pemimpin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala Kampung Sumber Rezeki melakukan penerapan kemampuan manajerialnya pada aspek kepemimpinan melalui upaya kepala kampung sebagai pemimpin untuk memahami kebutuhan-kebutuhan bawahan dan melakukan hubungan yang harmonis secara kontinyu (*relationship*) kepada mitra kerjanya sebagaimana dikemukakan dalam uraian hasil wawancara berikut:

“Kepala kampung selalu melakukan komunikasi dan hubungan yang baik dengan perangkatnya dan lembaga mitra kerjanya yang ada di kampung, termasuk karang taruna, sebagai bagian dari upaya kepala kampung untuk mengoptimalkan kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki” (Ketua Karang Taruna, wawancara September 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas, kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan pembangunan berjalan secara harmonis melalui dukungan perangkatnya dan lembaga kemasyarakatan di kampung sebagai mitra kerja pemerintah kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan karena kepala kampung menerapkan prinsip kepemimpinan yang secara kontinyu melakukan komunikasi dan hubungan dengan bawahan dan lembaga mitra kerjanya secara harmonis.

Pendekatan kepemimpinan kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan pembangunan juga menerapkan prinsip transaksi, dimana setiap masyarakat yang ikut bekerja dan membantu dalam kegiatan pembangunan fisik di kampung, diberikan penggantian biaya atau upah yang disesuaikan dengan kondisi

keuangan kegiatan, khususnya masyarakat yang membantu kegiatan pembangunan berdasarkan keterampilan atau keahlian yang dimiliki, seperti tukang kayu atau tukang batu. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hasil wawancara berikut:

“Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kampung, maka kegiatan pembangunan yang membutuhkan tenaga terampil seperti tukang kayu atau tukang batu, maka tenaga tersebut disiapkan biaya upaya sesuai dengan ketersediaan keuangan kegiatan pembangunan, sedangkan tenaga pembantunya berasal dari masyarakat umum yang bergotong royong” (BPD Kampung Sumber Rezeki, wawancara September 2025)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki pada aspek kepemimpinan, menerapkan sikap kepemimpinan traksisional, dimana setiap tindakan dan perbuatan yang berlaku dalam organisasi kampungnya, khususnya kegiatan pembangunan, dihargai dan diberikan perhatian yang layak melalui pemberian upah yang disesuaikan dengan kondisi keuangan kegiatan pembangunan.

Prinsip kepemimpinan transaksional yang dijalankan oleh kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan pembangunan, pada dasarnya merupakan bagian dari upaya kepala Kampung Sumber Rezeki menunjukkan kemampuan manajerial yang dimilikinya berdasarkan pendekatan individual yang dimilikinya yaitu sebagai pemimpin pemerintahan di kampung.

#### 4. Pengendalian dan Pengawasan

Pengarahan, yakni suatu pengaturan kegiatan secara organisasional, dimana rencana pembangunan yang telah dibuat juga telah diatur tentang segala sesuatunya, maka lalu organiaasi penyelenggara tersebut digerakan agar mereka mau dan suka bekerja dalam rangka menyelesaikan tugas demi tercapainya tujuan bersama dalam pembangunan. Dalam hal ini diusahakan agar mereka jangan semata-mata menerima perintah saja dari atasan. Mereka harus bergerak hatinya untuk menyelesaikan tugasnya seirama dengan keinsyafan masing-masing. Pemilihan dan penempatan personil pelaksana pembangunan di Kampung Sumber Rezeki dilakukan secara cermat dan atas pertimbangan serta masukan dari berbagai pihak sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan berikut:

“Penentuan organisasi pelaksana pembangunan dilakukan atas persetujuan BPD dan LPM, sehingga mereka juga terlibat dalam pengendalian dan kontrol serta pengawasan atas kinerja mereka” (BPD Kampung Sumber Rezeki, wawancara September 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki memiliki kemampuan manajerial yang cukup dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan. Hal ini ditunjukkan melalui pendekatan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan kepala kampung terhadap organisasi pelaksana pembangunan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa pendekatan manajerial yang dilakukan oleh kepala kampung terhadap organisasi pelaksana pembangunan di Kampung Sumber Rezeki adalah kegiatan pengawasan dan pendampingan untuk mensukseskan pelaksanaan tugas organisasi tersebut dalam pembangunan.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa kepala kampung memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai bagian dari tugas dan tanggungjawab kepala kampung sebagai pimpinan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan melakukan evaluasi kegiatan program yang telah dilaksanakan serta membimbing dalam pelaksanaannya.

Kepala kampung sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembangunan perlu melakukan pengarahan dan kontrol serta pengawasan secara berkesinambungan agar optimalisasi pelaksanaan pembangunan dapat tercapai. Walaupun rencana pembangunan yang telah dibuat dianggap tepat dan baik serta telah diatur sedemikian rupa, namun belum menjamin bahwa tujuan pembangunan yang diharapkan dengan sendirinya dapat dicapai. Masih harus ada kendali (*control*), apakah orang-orangnya telah tepat pada tempatnya (*the right man on right place*), juga cara mengerjakan dan waktunya apakah sudah sesuai atau belum. Sehingga kalau terdapat kesalahan-kesalahan selekas mungkin dapat diadakan perbaikan dengan segera hingga tujuan tercapai.

Dalam praktek manajemen letak perbedaan kedua konsep tersebut pada aksentuasi terhadap tindakan korektif “*Correction Action*”. Dimana dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif sudah terkandung

di dalamnya, sedangkan di dalam pengertian evaluasi tindakan korektif merupakan proses kelanjutannya guna mencapai sasaran. Olehnya itu maka berdasarkan konsep tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa evaluasi adalah kelanjutan pengendalian guna menilai hasil pelaksanaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki, pemerintah Kampung Sumber Rezeki perlu melibatkan institusi atau organisasi sebagai pelaksana sedangkan pemerintah kampung sebagai pengendali sekaligus pengevaluasi pelaksanaan program pembangunan tersebut.

## **5. Implikasi Kemampuan Manajerial Kepala Kampung Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan**

Pelaksanaan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki mencakup dua aspek utama, yaitu pembangunan fisik dan non fisik, yang keduanya merupakan implementasi dari program-program yang telah dirumuskan melalui proses perencanaan sebelumnya. Pada bidang fisik, pembangunan diwujudkan melalui rehabilitasi kantor kampung, pembangunan jalan usaha tani yang didanai melalui PNPM, pembangunan pos kamling, serta rehabilitasi drainase kampung. Hampir seluruh program tersebut dapat direalisasikan dengan baik karena didukung oleh berbagai faktor pendorong, terutama keterlibatan masyarakat dan kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan tugas di lapangan. Pembangunan fisik dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga program yang dianggap paling mendesak memperoleh perhatian utama. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sinergi antara perencanaan, dukungan masyarakat, dan efektivitas pelaksana pembangunan berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi hasil pembangunan fisik. Sementara itu, pembangunan non fisik diarahkan pada penguatan partisipasi sosial, keagamaan, dan keamanan lingkungan. Program non fisik meliputi kegiatan kerja bakti rutin, penyelenggaraan majelis taklim, serta penetapan petugas siskamling secara permanen. Seluruh kegiatan tersebut ditetapkan melalui keputusan kepala kampung dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat. Partisipasi masyarakat terlihat dari kepatuhan dan keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan, meskipun tingkat kehadiran dalam rapat perencanaan relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan manajerial dan kepemimpinan

kepala kampung berhasil mendorong partisipasi masyarakat serta mendukung keberhasilan pembangunan sosial dan kelembagaan di Kampung Sumber Rezeki.

## **Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kampung Sumber Rezeki**

### **1. Faktor Pendukung**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki adalah sebagai berikut:

#### a. Gaya kepemimpinan

Persepsi masyarakat yang positif terhadap gaya kepemimpinan kepala kampung dapat menjadi pendorong dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan pembangunan di kampung. Hal ini disebabkan karena adanya persepsi masyarakat yang simpatik dan mendukung kepemimpinan kepala kampung yang menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara terbuka, keberpihakan yang seimbang (adil) pada seluruh masyarakat.

Hasil penelitian tentang gaya kepemimpinan kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwa kepala kampung dapat memahami dan menampung aspirasi masyarakat secara baik dan benar, sehingga masyarakat merasa bahwa kepala Kampung Sumber Rezeki telah bersifat aspiratif. Hal ini sebagaimana dikemukakan informan sebagai berikut:

“Kemampuan manajerial kepala kampung dalam menampung aspirasi masyarakat adalah kemampuan memahami dan mencari jalan keluar terhadap berbagai masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat” (Tokoh masyarakat, wawancara September 2025).

Sejalan dengan pandangan di atas, salah seorang informan mengemukakan bahwa:

“Kepala Kampung Sumber Rezeki dapat memahami setiap keinginan masyarakat yang disuarakan melalui BPD dan mendahulukan kepentingan masyarakat, sehingga dalam menetapkan suatu ketentuan peraturan benar-benar mewakili kehendak dan aspirasi masyarakat bukan karena kepentingan dan kemauannya sendiri” (Ketua karang taruna Kampung Sumber Rezeki, Wawancara, September 2025).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala Kampung Sumber Rezeki, menunjukkan sikap simpati terhadap aspirasi masyarakat karena dianggap aspiratif dan mementingkan kebutuhan dan keinginan masyarakat umum.

Pemahaman terhadap setiap persoalan dan keinginan yang ada dalam masyarakat menjadi suatu keharusan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang aspiratif dan dapat membperleh dukungan masyarakat secara luas, olehnya itu sikap dan gaya kepemimpinan perlu mendahulukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat secara luas tentang kedudukan, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh seorang kepala kampung, sehingga masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan keinginannya dapat memahami prosedur dan tatacara yang diharapkan.

Dalam realitasnya tidak semua keinginan individu masyarakat dapat terpenuhi secara mutlak, oleh karena adanya perumusan strategis yang menentukan kebutuhan-kebutuhan strategis dan menkampungk yang lebih umum dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Dengan demikian, kepala kampung dapat menjalankan kegiatan pemerintahan yang didukung oleh masyarakat, karena pendekatan sosial dan humanis kepala kampung terhadap seluruh masyarakat, yang dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh dukungan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di kampung.

Konteks kepemimpinan kepala kampung yang biasanya harus segera mengambil keputusan secara cepat dalam rangka mengantisipasi hal-hal teknis dan memerlukan penanganan segera, apabila tidak dipahami oleh aparatur pemerintah kampung (perangkat kampung), sehingga BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya menganggap bahwa hal tersebut adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang telah dibuat, akan menjadi kendala dalam menciptakan harmonisasi hubungan kerjasama.

b. Transparansi

Pelaksanaan pembangunan merupakan wujud kewajiban kepala kampung menjalankan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban ini harus dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan prosedur yang telah

ditetapkan. Hal tersebut bukan hanya menyangkut aspek keuangan, akan tetapi juga menyangkut penggunaan berbagai sarana prasarana milik pemerintah kampung.

Kepala Kampung Sumber Rezeki telah berusaha untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan pemerintahan melalui pelaksanaan pembangunan dana milik pemerintah kampung secara terbuka dan sesuai dengan prosedur yang telah ditaetapkan. Namun karena adanya alokasi penggunaan dana yang bersifat menkampungk dan mendadak, sehingga proses pelaksanaannya kadangkala tidak sempat lagi dikonsultasikan kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Kampung (BPD).

Pelaksanaan pembangunan sebagai wujud program pemerintah Kampung Sumber Rezeki dalam bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat dimaksudkan sebagai bagian tanggung jawab kepala kampung kepada masyarakat sebagai pemimpin pemerintahan, dan dalam memenuhi amanah/kewajiban tanggungjawab tersebut, kepala Kampung Sumber Rezeki harus betul-betul bekerja atas dasar kepentingan masyarakat dan berdasarkan prosedur yang telah dituangkan dalam berbagai perencanaan pembangunan yang telah dibuat sebelumnya.

Prinsip transparansi dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki yang dijalankan oleh kepala kampung, menurut keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber, telah mencerminkan prinsip transparansi dan keterbukaan. Hal ini sebagaimana termuat dalam pernyataan berikut:

“Kepala kampung dalam melaksanakan pembangunan melibatkan seluruh organisasi mitra kerjanya termasuk karang taruna, jadi semua masyarakat dapat mengetahui apa yang akan dikerjakan dan tahu pengelolaan keuangannya” (Ketua LPM Kampung Sumber Rezeki, Wawancara September 2025)

Sejalan dengan pernyataan di atas, informan lain menyatakan bahwa:

“Kepala Kampung Sumber Rezeki selalu menyampaikan kepada masyarakat luas apa dan bagaimana realisasi dari pelaksanaan berbagai tugas dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan di kampung, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas-tugasnya kepada masyarakat (Ketua BPD Kampung Sumber Rezeki, Wawancara, September 2025)

Pernyataan informan di atas memberikan gambaran bahwa prinsip transparansi dalam proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh Kepala Kampung Sumber Rezeki telah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan oleh adanya pernyataan masyarakat terhadap kinerja kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan pembangunan yang secara aktual telah menggunakan mekanisme dan manajemen kerja yang bersifat terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan.

Prinsip pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang berlandaskan prosedur konstitusional berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kampung (Perdes) yang berlaku serta dijalankan dengan cara terbuka, memberikan implikasi positif terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di kampung. Hal ini ditunjukkan dari antusias masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung keputusan yang berpihak kepada mereka, sebagaimana dijelaskan dalam uraian hasil wawancara berikut:

“Walaupun masyarakat yang hadir rapat kurang, tetapi karena rencana yang dibuat pada saat rapat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga kalau rencana itu sudah dilaksanakan, maka kelihatan sekali masyarakat mendukung kegiatan pembangunan tersebut, dengan cara menghadiri dan membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut” (Tokoh adat Kampung Sumber Rezeki, wawancara, September 2025).

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan cukup tinggi, karena antusias untuk ikut bekerja membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya pada kegiatan pembangunan yang tujuannya adalah kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat akan berupaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan tersebut dan hasilnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat.

## 2. Faktor Penghambat

Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam suatu kegiatan pembangunan merupakan gambaran tentang keberhasilan kepala kampung dalam menerapkan kemampuan manajerialnya dalam pengendalian dan pengarahan terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan cenderung belum optimal, sebagaimana dinyatakan dalam hasil wawancara berikut:

“Tingkat kehadiran masyarakat mengikuti rapat perencanaan pembangunan di kampung masih rendah, kadang hanya 30 sampai 40 orang saja yang hadir, mungkin karena mereka banyak yang bekerja pada saat rapat, jadi tidak sempat hadir. Partisipasi masyarakat dalam memberikan saran dan masukan yang diharapkan dalam melengkapi perencanaan juga belum memuaskan” (BPD Kampung Sumber Rezeki, wawancara September 2025).

Hasil wawancara di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak optimal, karena masih kurangnya jumlah anggota masyarakat yang hadir mengikuti rapat. Demikian pula halnya dengan partisipasi dalam memberikan saran dan masukan yang diharapkan dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan.

Rendahnya kehadiran anggota masyarakat dalam rapat tidak menghalangi dan mengurangi semangat pemerintah Kampung Sumber Rezeki dalam pembuatan perencanaan pembangunan, karena pengurus BPD dan LPM membantu sepenuhnya pemerintah kampung untuk menyusun sebuah perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan kampung. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh informan dalam hasil wawancara berikut:

“Masyarakat masih kurang yang ikut rapat, tetapi pengurus LPM dan BPD dapat dianggap mewakili aspirasi masyarakat secara keseluruhan, sehingga pada saat penyusunan rencana pembangunan masukan dan saran dari anggota LPM dan BPD dianggap cukup untuk menyusun rencana pembangunan” (Ketua LPM Kampung Sumber Rezeki, Wawancara September 2025).

Berdasarkan pernyataan di atas, menggambarkan adanya solusi dalam mengatasi masalah rendahnya partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya adalah mengoptimalkan masukan dan saran dari masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan. Implikasinya adalah lahirnya sebuah perencanaan pembangunan yang partisipatif dan dapat mengakomodasi ide-ide masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya. Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan sesuai dengan

kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dapat menrangsang animo masyarakat untuk mensukseskan rencana pembangunan yang telah dibuat, melalui kegiatan gotong royong dan kerjasama dalam mensukseskan pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan, agar dapat mencapai hasil optimal.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Kemampuan manajerial kepala Kampung Sumber Rezeki dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ditunjukkan melalui perumusan rencana kegiatan dalam kegiatan Musrenbang, pembentukan organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, pendekatan kepemimpinan secara persuasif dan edukatif serta pengarahan dan pengendalian kegiatan pembangunan yang berorientasi pada upaya merangsang motivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara optimal dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Implikasinya yaitu optimalisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara fisik dapat tercapai, sedangkan dari aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih belum optimal karena tingkat kehadiran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah, (b) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki adalah (1) faktor pendukung; komponen yang menjadi faktor pendukung adalah gaya kepemimpinan kepala kampung dan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan di Kampung Sumber Rezeki, (2) Faktor penghambat; komponen yang menjadi faktor penghambat adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan karena sebagian besar masyarakat memiliki aktivitas di luar wilayah Kampung Sumber Rezeki, sehingga tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, B., Nasution, D. P., Rusiadi, R., & Pratiwi, D. (2024). *Teori Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi*. Medan: Penerbit Tahta Media.
- Kementerian Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). *Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Menuju Kemandirian Kampung*. Jakarta: Kemenkampung PDTT.

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022a). *Green Economy Mendorong Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Diakses dari <https://ekon.go.id>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022b). *Akselerasi Pemulihan Ekonomi serta Investasi di Bidang Green dan Blue Economy untuk Pembangunan Ekonomi Secara Berkelanjutan*. Diakses dari <https://ekon.go.id>
- Prastiwi, I. W., Amalia, D., & Khairani, S. (2025). Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 297–305.
- Putri, A. A., Aryazeta, A. A., Fu'ad, Z., Ismikarimah, I., Devi, Y., & Kurniati, E. (2024). Teori-Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 182–192.
- Sari, M., & Nugroho, R. A. (2022). Kepemimpinan Kepala Kampung dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–58
- Suryono, D. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung: Konsep dan Implementasi di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutrisno, B. (2020). *Pembangunan Kampung Berbasis Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung: Alfabeta